

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menyiratkan kemandirian nasional dalam segala bentuk pengejawantahannya itu, telah mengubah semua kerangka tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Kesadaran akan harkat diri sebagai anggota penuh warga dunia melahirkan pandangan yang mensyaratkan penuntutan pengakuan hak untuk tegak sama tinggi dan duduk sama rendah bersama bangsa-bangsa terhormat lainnya.

Sikap ini telah memunculkan fenomena sejarah bangungnya minat dan upaya untuk menguasai ilmu dan teknologi berikut pengembangan perlengkapan kebahasaannya dalam rangka kebangkitan nasional secara menyeluruh.

Sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 tersebut, bahasa Indonesia memperoleh kedudukan sebagai bahasa nasional. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan kebangsaan, (2) lambang identitas nasional, (3) alat yang memungkinkan penyatuan berbagai-bagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia, dan (4) alat

perhubungan antardaerah dan antarbudaya. (Helim, 1984:52)

Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, pasal 36. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pendidikan di dalam dunia pendidikan, (3) alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah, dan (4) alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. (Helim, 1984:53)

Secara politis kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia telah mantap, tetapi kemantapan dalam bidang politik ini tidak berarti tidak ada masalah lagi dalam kenyataan pemakaian bahasa Indonesia di lapangan. Kita masih menjumpai permasalahan bagaimana mewujudkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu dalam tingkah laku kebahasaan setiap anggota masyarakat pemakai bahasa Indonesia secara keseluruhan (Sunardji, 1983:5).

Emil Salim (1983:18) mengatakan bahwa dari jumlah penduduk 146,7 juta (penduduk pada tahun 1980), hanya 12% yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Dari data tersebut terlihat bahwa bahasa Indonesia dilihat dari jumlah pemakainya masih menduduki tempat kedua bagi bangsa Indonesia. Dalam hubungan itu bahasa Indonesia masih menjadi masalah dalam pendidikan dan pengajaran bahasa.

Walaupun telah menjadi bahasa pengantar sejak di sekolah dasar, tetapi penguasaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat, baik masyarakat lapisan atas maupun lapisan bawah masih memprihatinkan.

Kenyataan lain yang memprihatinkan ialah suara-suara yang menyatakan ketidakpuasan terhadap hasil pengajaran bahasa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan formal. Badudu (Kompas, 29 Mei 1985) mengatakan bahwa murid-murid lulusan SMTA masih belum dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam percakapan maupun dalam tulisan yang resmi sifatnya. Selanjutnya Muljanto Sumardi (Kompas, 24 September 1984) juga mengatakan, dalam dunia pendidikan, keterampilan berbahasa Indonesia perlu mendapat tekanan yang lebih banyak lagi, mengingat kemampuan berbahasa Indonesia di kalangan mahasiswa dan pelajar masih jauh dari yang diharapkan. Ungkapan yang senada juga dikemukakan oleh Burhan (1971), Sudjoko (1988, 1989), Harjasujana (1989), dan Samsuri (1983).

Kalau kita melihat kenyataan seperti itu, tentu timbul pertanyaan, Di mana letak salahnya? Siapa sebenarnya yang bersalah dalam kegagalan pengajaran bahasa Indonesia itu? Gurukah? Siswakah? Atau masyarakatkah? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah pekerjaan yang gampang, karena di antara pendidik terjadi saling menyalahkan, saling mencari kambing hitam yang menjadi penyebab ketidakberhasilan pengajaran bahasa Indonesia, hingga pada giliran yang terakhir siswalah yang menjadi sasaran utamanya (Safi'i, 1984

: 3-4; Sunarji, 1983).

Gambaran mengenai situasi saling menyalahkan ini, dikemukakan pada harian Kompas, 1 Nopember 1990

Guru dan murid sama-sama 'bingung' menghadapi mata pelajaran yang satu ini. Di satu pihak guru berpendapat para murid tidak tanggap -apalagi kreatif- dalam menerima dan menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Minimnya fasilitas mengajar, ketatnya jadwal mengajar, beragamnya materi yang harus diberikan, semakin membuat para guru sulit bernafas.

Di lain pihak, sudah bukan rahasia lagi bila pelajaran bahasa Indonesia tergolong paling kurang populer di mata murid. Umumnya siswa bosan dengan cara guru mengajar yang monoton dan instruksional. Apalagi materi pengajarannya 'itu-itulah saja'. Tapi apa boleh buat, kedua belah pihak sama-sama harus mengejar jumlah sks yang diwajibkan. Sehingga pelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah ibaratnya 'mati enggan mati tak mau'.

Terlepas dari siapa yang bersalah dan bertanggung jawab atas kegagalan pengajaran bahasa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan formal tersebut, Siahaan (1988) menegaskan bahwa "pengajaran bahasa Indonesia yang dilaksanakan selama ini belum seperti yang diharapkan. Lebih jelas Badudu (Kompas, 2 Agustus 1991) mengatakan,

Ada beberapa hal penting yang sering dilupakan oleh para pengajar bahasa Indonesia, yaitu materi pengajaran, cara penyajian, serta upaya membangkitkan kesadaran anak didik mengenai pentingnya bahasa Indonesia... Anak didik tidak pernah diberi kesempatan untuk berlatih berbahasa dengan baik dan benar.

Salah satu keputusan Kongres Bahasa Indonesia V, 1988 adalah "Pengajaran bahasa Indonesia di pergu-

ruan tinggi di luar jurusan bahasa dan sastra Indonesia hendaknya merupakan kebijakan nasional dan dipadukan dalam mata kuliah umum. (Prisma, nomor 1, 1989). Munculnya putusan Kongres Bahasa Indonesia V ini memberikan petunjuk bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan sangat penting dan sangat strategis.

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 32/DJ/KEP/1983, bahasa Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok kurikulum inti MKDU. Tetapi karena bahasa Indonesia penting sebagai bahasa penalaran dan sebagai bahasa pengungkap pengembangan hasil pendidikan, maka bahasa Indonesia diajarkan di perguruan tinggi dengan bobot 2 sks. (Kurikulum Inti MKDU, 1983:viii dan 4). Karena bahasa Indonesia tidak termasuk kelompok kurikulum inti MKDU, maka tidak ada kurikulum bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi yang berlaku secara nasional. Dengan situasi seperti ini setiap perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan bahasa Indonesia diberi keleluasaan untuk merencanakan dan menetapkan proses pendidikan bahasa Indonesia sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi yang mengelolanya (Keraf, 1989:3).

Dengan demikian setiap perguruan tinggi yang mengelola pendidikan bahasa Indonesia, harus mampu



merencanakan dan memilih materi pengajaran bahasa Indonesia sesuai dengan spesialisasi disiplin ilmunya.

Fakultas Hukum sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan para sarjana dalam bidang hukum, idealnya harus membekali mahasiswanya dengan keterampilan berbahasa yang baik, sehingga hukum dan undang-undang yang dihasilkan atau dikemukakan mereka, mudah dipahami dan tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan keputusan Kongres bahasa Indonesia IV tahun 1983,

Penggunaan bahasa Indonesia dalam semua bidang terutama bidang hukum dan perundang-undangan perlu segera digarap secara sungguh-sungguh, bertahap dan terpadu.

Semua aparat pemerintahan, terutama yang secara langsung terlibat dalam perencanaan, penyusunan, pengesahan, dan pelaksanaan hukum, harus memiliki kemampuan dan keterampilan bahasa Indonesia yang memadai, sehingga hukum dan undang-undang yang dihasilkan dan yang harus dilaksanakan mudah dipahami dan tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda.

Selanjutnya, Ismail Saleh (1988:11-17) menyatakan, bahasa hukum merupakan bagian dari bahasa Indonesia, maka bahasa hukum itu sendiri haruslah mengikuti ketentuan-ketentuan, aturan-aturan dan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam bahasa Indonesia.

Bahasa hukum yang tidak jelas akan mengakibatkan pula ketidakjelasan dalam isi dan peraturan-peraturan hukum yang pada akhirnya juga akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Selanjutnya bahasa perundang-undangan yang susunan kalimatnya panjang-panjang dan

bertele-tele serta semrawut, jelas tidak akan bisa dicerna oleh masyarakat, tidak bisa dihayati oleh pemakai perundangan-undangan.

Lebih lanjut Ismail Saleh mengetakan bahasa perundang-undangan itu harus singkat, jelas dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Tegasnya bahasa hukum itu harus komunikatif, bahasanya singkat, jelas, tidak bertele-tele dan tidak melanggar kaidah-kaidah bahasa Indonesia, serta memiliki rasa estetika. Hal ini sejalan dengan ungkapan Mochtar Kusumatmaja (1974),

Kita tidak mungkin membina suatu hukum nasional apabila karya-karya dibidang hukum ditulis dalam suatu bahasa yang tidak dipahami rakyat dan karenanya tidak mungkin pula diresapi artinya sedalam-dalamnya.

Ciri-ciri bahasa keilmuan, termasuk bahasa hukum antara lain adalah :

- a. Lugas dan eksak karena menghindari dari kesamaran dan ketaksaan.
- b. Objektif dan menekan prasangka pribadi.
- c. Memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat, dan kategori yang diselidikinya untuk menghindari kesimpangsiuran.
- d. Tidak beremosi dan menjauhkan taksiran yang beresentasi.
- e. Cenderung membakukan makna kata-katanya, ungkapannya, dan juga paparannya berdasarkan konvensi.
- f. Gaya bahasa keilmuan tidak dogmatis atau fanatik.
- g. Gaya bahasa keilmuan bercorak hemat, dan
- h. Bentuk, makna, dan fungsi kata ilmiah lebih mantap dan stabil dari yang dimiliki kata biasa (Moeliono, 1974).

, Di perguruan tinggi, pengajaran bahasa Indonesia

diarahkan kepada (1) kesanggupan memahami apa yang dikatakan (baik lisan maupun tulisan) orang lain dalam bahasa Indonesia, dan (2) kesanggupan memanfaatkan bahasa Indonesia untuk menyatakan perasaan, pikiran, dan keinginan baik secara lisan maupun tertulis dengan tepat, sesuai dengan keadaan, bahan yang dibicarakan, dan hubungan sosial budaya antara siapa yang terlibat, dengan tidak menggunakan unsur bahasa asing atau bahasa lain bila tidak benar-benar dibutuhkan (Halim, 1984:42; Sarwadi dkk., 1982:17-18).

Tujuan pertama merupakan penguasaan bahasa reseptif yang menuntut kemampuan decoding, sedangkan tujuan kedua merupakan penguasaan bahasa produktif yang menuntut kemampuan encoding (Harris, 1979: 9; Hamid, 1986:1).

Berdasarkan beberapa penelitian terhadap kemampuan berbahasa mahasiswa yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa tujuan pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi belum tercapai, lebih-lebih dalam kemampuan menulis (encoding). Karena itu pendapat yang mengatakan bahwa pengajaran bahasa Indonesia yang dilaksanakan selama ini belum seperti yang diharapkan, perlu disimak dan diperhatikan serta dicari tindak lanjut untuk mengatasinya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini



akan meneliti bagaimana pengajaran bahasa Indonesia dilaksanakan di perguruan tinggi pada jurusan nonbahasa Indonesia.

Penelitian ini difokuskan pada tiga hal, yaitu (1) tujuan apakah yang hendak dicapai dalam kuliah bahasa Indonesia yang dilaksanakan, (2) bagaimana PBM kuliah bahasa Indonesia dilaksanakan, dan (3) materi apakah yang disajikan dalam kuliah bahasa Indonesia tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian terdahulu terlihat bahwa pengajaran bahasa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan termasuk di perguruan tinggi, masih belum mencapai sasaran seperti yang diharapkan. Masalah yang menyebabkannya sangat kompleks, karena itu penelitian ini tidak mungkin membahas keseluruhannya. Penelitian ini hanya membahas tentang tujuan, PBM, dan materi pengajaran bahasa Indonesia pada jurusan nonbahasa di UISU dan di IKIP Medan pada semester ganjil 1990/1991.

Untuk lebih jelas, rumusan masalah penelitian ini dituangkan ke dalam pertanyaan : Bagaimanakah pengajaran bahasa Indonesia di UISU dan di IKIP Medan dilaksanakan?

Masalah tersebut dapat dirinci lagi dengan pertanyaan-pertanyaan berikut :

- (1) Tujuan apakah yang akan dicapai dalam pengajaran bahasa Indonesia yang dilaksanakan di Fakultas Hukum UISU dan di IKIP Medan?
- (2) Bagaimanakah pelaksanaan PBM bahasa Indonesia di Fakultas Hukum UISU dan di IKIP Medan?
- (3) Materi apa sejahkah yang disajikan dalam pengajaran bahasa Indonesia di Fakultas Hukum UISU dan di IKIP Medan?
- (4) Apakah PBM yang dilaksanakan menunjang pencapaian tujuan pengajaran?
- (5) Apakah materi-materi yang disajikan relevan dengan tujuan pengajaran yang telah ditetapkan?

### 1.3 Pentingnya Masalah

Ketiga hal (tujuan, pelaksanaan PBM, dan materi yang disajikan) yang dijadikan fokus masalah dalam penelitian ini penting untuk diteliti karena :

Pada hakekatnya, semua kegiatan yang dilakukan dalam suatu program pengajaran bahasa adalah untuk mencapai suatu target atau tujuan tertentu. Dengan demikian tujuan itu menjadi pemandu dan pedoman untuk seluruh kegiatan yang dilakukan. Karena itu tujuan pengajaran harus dirumuskan dengan jelas. Rumusan

tujuan yang jelas, akan sangat membantu dalam merencanakan serta melaksanakan suatu program pengajaran bahasa. Pentingnya tujuan dalam suatu program pengajaran bahasa dinyatakan Sumardi (1991) dengan;

Rumusan tujuan pengajaran bahasa Indonesia yang jelas, merupakan hal yang fundamental, karena hal ini akan menentukan variabel-variabel yang lain dalam suatu program pengajaran, seperti materi pengajaran, kualifikasi pengajar, organisasi pengelolaan, pendanaan, kualifikasi peserta didik, evaluasi, sarana penunjang, dan sebagainya.

Selanjutnya, penilaian terhadap suatu program pengajaran diukur dengan tujuan yang hendak dicapai. Bila tujuan pengajaran tercapai, maka program pengajaran yang dilaksanakan dinilai berhasil, demikian pula sebaliknya, bila tujuan pengajaran tidak terpenuhi, maka pengajaran itu dinilai gagal.

Berhasil atau gagalnya suatu proses pengajaran banyak tergantung pada baik tidaknya proses belajar mengajar yang dilaksanakan. Umumnya proses belajar mengajar yang dikelola dengan baik akan mendukung pencapaian tujuan dari suatu program pengajaran, demikian pula sebaliknya, proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa perencanaan yang baik tidak akan mendukung pencapaian tujuan pengajaran.

Pandangan guru tentang konsep mengajar akan mewarnai dan menentukan model proses belajar mengajar

yang dipilih. Pemilihan model proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan dan materi yang disajikan akan banyak membantu pencapaian tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Brown (1980:2) menyatakan salah satu prinsip yang harus diketahui dalam proses belajar mengajar bahasa adalah bagaimana proses belajarmengajar dilaksanakan.

Pada hakekatnya suatu bentuk pengajaran bertujuan untuk menyampaikan sesuatu materi. Sehubungan dengan hal ini Brown (1980:2) mengajukan pertanyaan apa yang harus dipelajari siswa dan apa pula yang harus diajarkan guru? Untuk menjawab hal ini bukanlah hal yang mudah, karena untuk menentukan materi yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan siswa belajar bahasa, guru dituntut mengetahui teori-teori pengembangan materi pengajaran yang sesuai dengan tingkat kematangan dan latar belakang budaya siswa yang diajarnya. salah satu faktor penyebab kegagalan pengajaran bahasa Indonesia karena materi yang diajarkan disusun berdasarkan pendekatan tradisional, yang bertolak dari apa yang dapat diajarkan dan dapat dipelajari, bukan berdasarkan analisis kebutuhan, atau setidaknya berdasarkan pertimbangan keperluan siswa (Gumarwan, 1988).

Di samping alasan-alasan di atas, masalah

penelitian ini penting karena pembahasannya akan membicarakan kesiapan dan persiapan dosen dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan selama ini, pada umumnya hanya membahas ketidakmampuan berbahasa para mahasiswa, dan sepanjang pengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang mengungkapkan mengapa para mahasiswa tidak terampil berbahasa. Apakah semua kesalahan hanya dibebankan kepada pihak mahasiswa? Atau apakah pengajaran bahasa Indonesia yang dilaksanakan di perguruan tinggi selama ini memang tidak mendukung pembentukan keterampilan berbahasa para mahasiswanya; seperti yang sering diungkapkan para pakar pengajaran bahasa Indonesia, bahwa pengajaran bahasa Indonesia hanya menekankan pengetahuan tentang bahasa, bukan membimbing mahasiswa untuk terampil berbahasa (Sumardi, 1988; Badudu, 1985)

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai :

- (1) Pelaksanaan PBM kuliah bahasa Indonesia di Fakultas Hukum UISU dan di IKIP Medan.
- (2) Tujuan pengajaran bahasa Indonesia pada jurusan non-bahasa Indonesia di Fakultas Hukum UISU dan di IKIP Medan.



- (3) Materi-materi yang disajikan dalam pengajaran bahasa Indonesia di Fakultas Hukum UISU dan di IKIP Medan.
- (4) Ke-relevan-an materi yang disajikan dengan tujuan pengajaran yang telah ditetapkan.
- (5) Ke-relevan-an PBM yang dilaksanakan dengan pencapaian tujuan pengajaran yang telah ditetapkan.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan mata kuliah bahasa Indonesia pada jurusan nonbahasa di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), dan di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Medan.

#### 1.6 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik kualitatif. Analisis dilakukan dengan kata-kata, bukan dengan perhitungan statistik. Data yang dikumpulkan berdasarkan observasi situasi yang wajar, sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi dengan sengaja (Nasution, 1988:9). Paradigma ini dipilih dengan alasan sebagai berikut :

- (1) Penelitian ini mengambil setting kelas, tempat terjadinya interaksi antara dosen dengan mahasiswa.

Untuk dapat memahami interaksi yang terjadi dalam kelas ini, pendekatan yang dilakukan secara fenomenologis diperkirakan lebih tepat, karena penelitian ini dilaksanakan dengan mengamati secara langsung setiap fenomena yang terjadi di lapangan (dalam kelas). Dengan demikian pendekatan naturalistik lebih relevan digunakan.

- (2) Melalui pendekatan naturalistik, peneliti dapat mengamati proses belajar mengajar yang dilaksanakan, mengetahui secara langsung materi-materi yang disajikan dosen dalam PBM, dan segala gejala yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dalam situasi yang wajar dan natural. Dengan demikian peneliti memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh penemuan-penemuan langsung dari sumber utamanya.
- (3) Penelitian ini berusaha menemukan 'makna' dari setiap gejala dan peristiwa yang muncul dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan salah satu karakteristik penelitian naturalistik yang mementingkan pada meaning.

### 1.7 Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah memahami istilah yang digunakan pada judul penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut.

- (1) Pengajaran bahasa Indonesia adalah kuliah bahasa Indonesia yang dilaksanakan di Fakultas . . Hukum UISU dan di IKIP Medan dengan bobot 2 sks.
- (2) Tujuan pengajaran adalah sasaran yang hendak dicapai dari pengajaran bahasa Indonesia yang berbobot 2 sks.
- (3) PBM adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan proses penyampaian dan penerimaan materi perkuliahan di kelas.
- (4) Materi kuliah adalah bahan atau pokok bahasan yang disajikan dosen di kelas.



